

UPAYA AUSTRALIA UNTUK MENGHADAPI KEBIJAKAN *BELT AND ROAD INITIATIVE* (BRI) TIONGKOK DI PAPUA NUGINI

Oleh: Nofira Nurfadhillah

email: novira.nurfadhillah2505@student.unri.ac.id

Pembimbing: Ahmad Fuadi, S.IP., M.Si

Bibliografi: 4 Buku, 19 Jurnal, 57 Website

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simpang Baru Pekanbaru, Riau

ABSTRAK

Papua Nugini memiliki posisi strategis di kawasan Pasifik Selatan dan menjadi wilayah penting dalam perebutan pengaruh antara kekuatan besar seperti Australia dan Tiongkok. Melalui inisiatif *Belt and Road Initiative* (BRI), Tiongkok telah menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun infrastruktur di Papua Nugini, termasuk pelabuhan, jalan raya, pembangkit listrik, dan jaringan komunikasi. Ekspansi ini menimbulkan kekhawatiran bagi Australia, yang secara historis memiliki hubungan erat dengan Papua Nugini dan memandang kehadiran Tiongkok sebagai ancaman terhadap stabilitas regional dan dominasinya di kawasan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana Australia merespons kehadiran dan pengaruh BRI Tiongkok di Papua Nugini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder dari dokumen resmi, jurnal akademik, dan berita terkini. Perspektif yang digunakan berasal dari teori sekuritisasi *Copenhagen School* yang dikembangkan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde. Dalam teori ini, isu keamanan dipahami sebagai konstruksi sosial yang ditentukan oleh aktor yang berwenang dan diterima oleh audiens. Melalui teori ini, penulis menganalisis bagaimana Australia mengkonstruksi kehadiran Tiongkok di Papua Nugini sebagai ancaman terhadap kepentingan strategis nasionalnya. Analisis dilakukan pada level negara-bangsa, menyoroti dinamika kebijakan luar negeri Australia dalam menghadapi ekspansi Tiongkok.

Penelitian menemukan bahwa Australia menanggapi kehadiran BRI Tiongkok dengan melakukan sekuritisasi isu melalui retorika pemerintah, media, dan laporan intelijen, yang membingkai BRI sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan stabilitas kawasan. Upaya ini diwujudkan dalam bentuk peningkatan kerja sama pertahanan dengan Papua Nugini, bantuan pembangunan infrastruktur melalui *Australian Infrastructure Financing Facility for the Pacific* (AIFFP), serta penguatan posisi Australia dalam forum regional seperti *Pacific Islands Forum* (PIF). Strategi Australia mencerminkan pergeseran dari diplomasi reaktif ke pendekatan strategis yang bertujuan mempertahankan hegemoninya di Pasifik Selatan di tengah kompetisi geopolitik dengan Tiongkok.

Kata Kunci: Ancaman, *Belt and Road Initiative*, Keamanan Regional, Kebijakan

AUSTRALIA'S STRATEGIC RESPONSE TO CHINA'S BELT AND ROAD INITIATIVE (BRI) IN PAPUA NEW GUINEA

Author: Nofira Nurfadhillah

email: novira.nurfadhillah2505@student.unri.ac.id

Supervisor: Ahmad Fuadi, S.IP., M.Si

Bibliografi: 4 Books, 19 Journals, 57 Websites

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simpang Baru Pekanbaru, Riau

ABSTRACT

Papua New Guinea (PNG) holds a strategic position in the South Pacific and has become a focal point in the geopolitical competition between major powers such as Australia and China. Through the Belt and Road Initiative (BRI), China has invested billions of dollars in infrastructure development across PNG, including ports, roads, power plants, and telecommunications networks. This growing presence has raised concerns in Australia, a traditional partner of PNG, which views China's involvement as a threat to regional stability and its long-standing influence in the Pacific. This study aims to explore Australia's efforts in responding to China's increasing influence in PNG through BRI.

This study applies a qualitative research method, relying on secondary data gathered from official documents, academic journals, and news sources. The analytical framework is based on the Copenhagen School's securitization theory, developed by Barry Buzan, Ole Wæver, and Jaap de Wilde, which sees security threats as socially constructed through discourse. The research examines how Australia constructs China's involvement in PNG as a strategic threat to its national interests. The level of analysis used is the nation-state, focusing on how domestic and international factors shape Australia's foreign policy in the face of China's geopolitical expansion.

The findings reveal that Australia has securitized China's BRI activities in PNG through official rhetoric, media narratives, and intelligence reports that portray BRI as a threat to national security and regional stability. In response, Australia has taken extraordinary measures, including enhancing defense cooperation with PNG, providing competitive infrastructure aid through the Australian Infrastructure Financing Facility for the Pacific (AIFFP), and strengthening its role in regional forums like the Pacific Islands Forum (PIF). These strategies reflect a shift in Australia's foreign policy from reactive diplomacy to proactive strategic engagement aimed at maintaining its dominance in the South Pacific amid China's rise.

Keywords: *Threats, Belt and Road Initiative, Regional Security, Polic*

PENDAHULUAN

Papua Nugini (PNG) merupakan negara kepulauan yang terletak di bagian timur Pulau Nugini, berbatasan langsung dengan Provinsi Papua, Indonesia, dan berdekatan secara geografis dengan Australia di sebelah selatan. Lokasinya yang strategis di Pasifik Selatan menjadikan PNG sebagai wilayah penting dalam persaingan geopolitik antara kekuatan besar. Dalam satu dekade terakhir, Tiongkok aktif memperluas pengaruhnya di PNG melalui program *Belt and Road Initiative* (BRI), terutama dalam pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan raya di Provinsi Highlands, perluasan Pelabuhan Lae di Morobe, dan pengembangan jaringan komunikasi nasional yang dikelola oleh Huawei. Selain itu, proyek konstruksi jalan dan jembatan juga tersebar di wilayah ibu kota Port Moresby dan kawasan pesisir utara. Proyek-proyek ini tidak hanya menghubungkan daerah-daerah terpencil dan mendukung konektivitas ekonomi domestik PNG, tetapi juga meningkatkan akses strategis Tiongkok terhadap jalur pelayaran Pasifik.¹

Australia, yang secara historis memiliki pengaruh kuat terhadap pembangunan, keamanan, dan kebijakan luar negeri negara-negara di Pasifik Selatan, memandang ekspansi Tiongkok melalui BRI di Papua Nugini sebagai tantangan serius terhadap dominasi tradisionalnya. Hal ini tercermin dari

berbagai pernyataan pejabat tinggi pemerintah Australia, seperti Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri, yang secara terbuka menyatakan kekhawatiran terhadap meningkatnya keterlibatan Tiongkok di kawasan tersebut. Lembaga think tank seperti *Lowy Institute* dan *Australian Strategic Policy Institute* (ASPI) turut memproduksi narasi ancaman terkait proyek-proyek BRI yang dianggap dapat meningkatkan ketergantungan ekonomi Papua Nugini terhadap Tiongkok serta membuka peluang bagi kehadiran militer dan intelijen asing. Selain itu, media Australia secara konsisten memuat berita yang menyoroti potensi risiko dari utang luar negeri PNG kepada Tiongkok dan potensi kerentanan politik domestik yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan strategis Beijing. Diskursus-diskursus ini menjadi bagian dari konstruksi wacana sekuritisasi terhadap BRI di Papua Nugini.²

Dalam konteks tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana Australia merespons kebijakan BRI Tiongkok di Papua Nugini melalui pendekatan sekuritisasi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana Australia secara aktif membingkai keterlibatan Tiongkok bukan semata sebagai isu ekonomi, tetapi sebagai ancaman terhadap stabilitas dan kepentingan strategis kawasan. Teori sekuritisasi dari *Copenhagen School* menjadi kerangka utama dalam menganalisis

¹ Ronald Nangoi, "Australia Dan Kawasan Pasifik Selatan," *Analisis CSIS* (1983): hlm 10.

² Ibid.

proses ini, dengan fokus pada tindakan tutur (*speech act*) dari aktor sekuritisasi seperti pemerintah, lembaga think tank, dan media, serta bagaimana audiens domestik dan internasional menerima dan melegitimasi narasi ancaman tersebut. Dengan melihat respons Australia secara diplomatik, ekonomi, dan militer terhadap pengaruh BRI di Papua Nugini, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa sekuritisasi telah menjadi alat strategis dalam kebijakan luar negeri Australia untuk membatasi ekspansi Tiongkok di Pasifik Selatan dan mempertahankan hegemoninya di kawasan.³

KERANGKA DASAR TEORI

Perspektif Copenhagen School

Penelitian ini menggunakan perspektif *Copenhagen School*, yang merupakan pendekatan kritis dalam kajian keamanan dan hubungan internasional. Berbeda dengan perspektif realisme yang memandang keamanan sebagai persoalan objektif dan militeristik, *Copenhagen School* berpendapat bahwa isu keamanan bersifat intersubjektif, dibentuk melalui praktik diskursif dan konstruksi sosial. Dengan kata lain, suatu fenomena hanya menjadi ancaman keamanan apabila dikonstruksikan sebagai ancaman oleh aktor tertentu dan mendapat legitimasi dari audiens yang dituju.⁴

Dalam konteks ini, keterlibatan Tiongkok di Papua Nugini melalui proyek-proyek *Belt and Road*

Initiative (BRI) yang secara permukaan bersifat ekonomi dan pembangunan tidak serta merta dianggap sebagai isu keamanan. Namun, melalui praktik wacana yang dilakukan oleh aktor politik Australia seperti pejabat pemerintah, lembaga think tank, dan media massa, isu tersebut dikonstruksi sebagai ancaman terhadap kepentingan strategis Australia di kawasan Pasifik Selatan. Perspektif *Copenhagen School* memungkinkan peneliti untuk menelaah dinamika diskursif tersebut dan menelusuri bagaimana narasi ancaman dibentuk, didistribusikan, dan diterima dalam lingkungan strategis Australia.

Teori Sekuritisasi

Teori sekuritisasi merupakan teori utama yang digunakan dalam penelitian ini. Teori ini diperkenalkan oleh Ole Wæver dan kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Barry Buzan, Jaap de Wilde, dan Wæver sendiri melalui kerangka kerja yang dikenal *sebagai Security: A New Framework for Analysis* (1998). Teori ini menekankan bahwa sekuritisasi adalah tindakan tutur (*speech act*) yaitu proses ketika aktor menyatakan bahwa suatu isu merupakan ancaman eksistensial yang mendesak, sehingga memerlukan tindakan luar biasa di luar prosedur politik normal.⁵

Dalam penelitian ini, Australia diposisikan sebagai aktor sekuritisasi (*securitizing actor*), yang membingkai kehadiran BRI di Papua Nugini sebagai ancaman strategis,

³ A. Diskaya, "Towards a Critical Securitization Theory: The Copenhagen and Aberystwyth Schools of Security Studies," *E-International Relations* (2013): hlm 2.

⁴ Ibid.

⁵ Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis* (Lynne Rienner, 1998).hlm 23-31.

baik terhadap dominasi ekonomi, stabilitas politik, maupun pengaruh diplomatik Australia di kawasan. Objek referensial (*referent object*) yang ingin dilindungi adalah kepentingan nasional Australia, terutama dalam mempertahankan hegemoninya di Pasifik Selatan. Audiens dalam hal ini adalah publik domestik Australia, mitra regional seperti Papua Nugini dan negara-negara *Pacific Islands Forum*, serta aliansi strategis seperti Amerika Serikat.⁶ Ketika audiens menerima klaim ancaman tersebut, maka tindakan luar biasa seperti peningkatan kerja sama pertahanan, bantuan infrastruktur tandingan, atau peningkatan diplomasi regional dapat dibenarkan.

Melalui teori ini, penelitian menelaah bagaimana Australia tidak hanya menanggapi BRI secara teknis atau pragmatis, tetapi membingkai dan memosisikannya secara politis sebagai isu keamanan yang mendesak.

Tingkat Analisis: Negara-Bangsa

Tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat negara-bangsa. Hal ini sesuai dengan fokus kajian, yaitu bagaimana negara Australia sebagai aktor sentral merespons kebijakan BRI Tiongkok di Papua Nugini dalam kerangka kebijakan luar negerinya. Tingkat ini memandang negara sebagai unit analisis yang bersifat otonom dan rasional, yang bertindak berdasarkan

kepentingan nasionalnya dalam sistem internasional yang anarkis. Negara diposisikan sebagai entitas yang memiliki kehendak, kapasitas, dan tujuan strategis yang membentuk kebijakan eksternal, termasuk dalam merespons perubahan geopolitik dan penetrasi kekuatan asing.

Sebagaimana dijelaskan oleh Mohtar Mas'ood, analisis pada tingkat negara-bangsa membantu menjelaskan perilaku politik luar negeri sebagai hasil dari interaksi antara faktor domestik dan internasional. Dalam konteks ini, respon Australia terhadap BRI di Papua Nugini tidak hanya mencerminkan perubahan eksternal dalam struktur kekuasaan regional, tetapi juga dinamika domestik yang berkaitan dengan legitimasi politik, tekanan dari aliansi tradisional (seperti AS), serta persepsi ancaman terhadap stabilitas dan nilai-nilai liberal yang dijunjung Australia di kawasan Pasifik.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali makna, persepsi, dan konstruksi sosial yang dibentuk dalam konteks politik luar negeri dan wacana keamanan. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial-politik berdasarkan realitas yang dibentuk melalui

⁶ Yu Jie, "What Is China's Belt and Road Initiative (BRI)?," *Chatham House*, last modified 2022, <https://www.chathamhouse.org/2021/09/what-chinas-belt-and-road-initiative-bri>.

⁷ Mochtar Mas'ood, *Mas'ood, Mochtar. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi. Jakarta : PT.Pustaka LP3ES Indonesia. Hal.41* (Jakarta: PT.Pustaka LP3ES Indonesia, 1994).

interaksi aktor dan diskursus, bukan berdasarkan generalisasi statistik. Oleh karena itu, metode ini relevan untuk menelaah bagaimana Australia membingkai kehadiran *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok di Papua Nugini sebagai ancaman keamanan strategis.⁸

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) terhadap dokumen resmi pemerintah Australia dan Papua Nugini, laporan lembaga think tank seperti *Lowy Institute* dan *Australian Strategic Policy Institute* (ASPI), artikel berita dari media seperti *ABC News* dan *The Australian*, serta publikasi jurnal akademik terkait sekuritisasi dan hubungan internasional di kawasan Pasifik Selatan. Sumber data sekunder ini kemudian dianalisis secara kritis dengan mengidentifikasi pola narasi ancaman, pernyataan-pernyataan politis, serta langkah-langkah kebijakan yang dikeluarkan oleh aktor negara.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Pendekatan di Era Albanese: Inklusivitas Strategis sebagai Wajah Baru Sekuritisasi

Terpilihnya Anthony Albanese sebagai Perdana Menteri Australia pada Mei 2022 menandai pergeseran gaya dalam pendekatan kebijakan luar negeri Australia

terhadap kawasan Pasifik Selatan, termasuk Papua Nugini. Jika pemerintahan sebelumnya (Scott Morrison) cenderung mengadopsi pendekatan keras dan konfrontatif terhadap keterlibatan Tiongkok di kawasan, maka Albanese berupaya menampilkan wajah yang lebih kooperatif, inklusif, dan berorientasi pada solidaritas kawasan melalui slogan diplomatik "*Pacific Family*". Namun demikian, substansi kebijakannya tetap berada dalam kerangka sekuritisasi: pengaruh Tiongkok tetap dibingkai sebagai ancaman, dan strategi Australia tetap diarahkan pada pembatasan ekspansi kekuatan Beijing di Pasifik.¹⁰

Transformasi pendekatan kebijakan luar negeri Australia terhadap Papua Nugini di era pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese ditandai dengan pergeseran gaya diplomasi dari konfrontatif menjadi kooperatif. Di bawah kepemimpinan Albanese sejak 2022, Australia mulai mengusung narasi diplomatik baru yang dikenal dengan konsep *Pacific Family*. Konsep ini menekankan solidaritas kawasan, persaudaraan regional, dan keterikatan sejarah dengan negara-negara Pasifik Selatan, termasuk Papua Nugini. Retorika tersebut digunakan untuk membangun kembali kepercayaan negara-negara mitra yang sempat terganggu akibat pendekatan keras dan elitis pada masa pemerintahan sebelumnya. Namun demikian, walaupun gaya komunikasi dan narasinya berubah, esensi strategis

⁸ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, "Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 228, [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif%20Di%20Bidang%20Pendidikan.pdf).

⁹ Ibid.

¹⁰ Agung Jaya Bakti, "Senaspolhi 4 Fisip Unwahas 2022 | 156" (2022): 156–173, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SENASPOLHI/article/viewFile/9616/4861>.

kebijakan luar negeri Australia tetap berakar pada upaya mempertahankan hegemoninya di kawasan dan membatasi pengaruh Tiongkok, khususnya melalui proyek *Belt and Road Initiative* (BRI).¹¹

Pendekatan Albanese dikemas dalam strategi pembangunan sosial yang bersifat partisipatif dan berorientasi jangka panjang. Program seperti *Pacific Australia Labour Mobility* (PALM) diperluas untuk menyediakan akses kerja bagi ribuan warga Pasifik di sektor agrikultur dan jasa Australia, serta memperkuat hubungan antarwarga sebagai fondasi diplomasi sosial. Di sisi lain, bantuan pembangunan dalam bentuk pendidikan, infrastruktur pedesaan, dan mitigasi perubahan iklim menjadi pilar utama pendekatan baru ini. Meskipun secara eksplisit tidak menyatakan bahwa program-program tersebut adalah respons terhadap Tiongkok, substansinya tetap bertujuan menanamkan ketergantungan terhadap Australia dan membangun persepsi bahwa Canberra adalah mitra yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan kawasan. Dalam konteks teori sekuritisasi, ini merupakan bentuk narasi “positif” untuk menghambat pengaruh eksternal, di mana kehadiran Australia dibingkai sebagai solusi terhadap tantangan regional dan dengan itu, memperkuat legitimasi tindakan luar biasa tanpa perlu menggunakan retorika ancaman secara langsung.¹²

¹¹ Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), *2023–2024 Pacific Engagement Strategy*, 2023, <https://www.dfat.gov.au>.

¹² DFAT, *Pacific Australia Labour Mobility (PALM) Scheme: Fact Sheet*, 2024, <https://www.dfat.gov.au>.

¹³ Tom Conley, “Issues in Australian Foreign Policy July to December 2023,” *Australian*

Di sisi lain, strategi *soft containment* tetap berjalan paralel dengan pendekatan diplomatik yang lebih halus. Pemerintah Australia menolak beberapa keterlibatan Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur strategis di Papua Nugini, khususnya dalam sektor telekomunikasi dan pelabuhan. Di tingkat regional, Australia mempererat koordinasi dengan negara-negara aliansi seperti Amerika Serikat dan Jepang, terutama melalui kerja sama trilateral dan Quad, guna memastikan respons kolektif terhadap ekspansi pengaruh Beijing.¹³ Langkah ini juga disertai dengan penandatanganan Perjanjian Keamanan Bilateral Australia-Papua Nugini tahun 2023, yang memungkinkan kerja sama militer lebih dalam, pelatihan pasukan, serta modernisasi sistem keamanan PNG. Meskipun tidak dilakukan dalam nada konfrontatif, tindakan-tindakan ini merupakan bentuk konkret dari sekuritisasi bergaya baru yakni melalui kanal diplomasi, pembangunan, dan keterlibatan regional yang tetap diarahkan untuk menjaga dominasi strategis Australia di kawasan Pasifik Selatan.¹⁴

Konstruksi Ancaman: Proyek BRI sebagai Isu Keamanan Regional

Australia secara aktif membingkai keterlibatan Tiongkok dalam proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) di Papua Nugini sebagai sebuah

Journal of Politics and History 70, no. 2 (2024): 300–322.

¹⁴ Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), *Australia-Papua New Guinea Bilateral Security Agreement Fact Sheet*, December 2023, <https://www.dfat.gov.au>.

ancaman terhadap stabilitas kawasan Pasifik Selatan dan kepentingan nasionalnya. Konstruksi ini dilakukan melalui berbagai *speech act* oleh pejabat tinggi negara yang memiliki otoritas politik dan keamanan untuk mendefinisikan suatu isu sebagai ancaman eksistensial.

Contoh konkrit datang dari Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, dalam pidatonya di parlemen tahun 2023. Ia menegaskan:

“Keberadaan investasi Tiongkok di Papua Nugini bukan hanya soal ekonomi, tapi telah berubah menjadi tantangan strategis yang mengancam stabilitas kawasan dan kepentingan keamanan Australia”.¹⁵

Pernyataan ini bukan sekadar retorika diplomatik, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk membentuk kesadaran ancaman di kalangan pembuat kebijakan dan masyarakat. Dengan kapasitasnya sebagai menteri, Penny Wong memiliki legitimasi untuk menetapkan agenda dan memulai proses sekuritisasi.

Selain itu, Menteri Pertahanan Australia tahun 2023, yang dikutip dalam laporan resmi *The Australian*, menyatakan bahwa:

*“Investasi Tiongkok di Papua Nugini dan Pasifik Selatan bukan sekadar pembangunan ekonomi, tetapi bagian dari strategi militer yang dapat mengancam keamanan regional dan kedaulatan Australia.”*¹⁶

¹⁵ Penny Wong, pidato resmi di Parlemen Australia, saat kunjungan ke Papua Nugini, Januari 12, 2023, dikutip dari *“Anthony Albanese addresses PNG parliament ahead of new security deal,” news.com.au*, 12 Januari 2023.

Pernyataan tersebut memperkuat narasi bahwa keterlibatan Tiongkok di kawasan tidak lagi dianggap sebagai isu pembangunan semata, melainkan telah bergeser menjadi isu strategis dan keamanan.

Sementara itu, Direktur *Australian Security Intelligence Organisation* (ASIO) dalam laporan tahunannya juga menyampaikan bahwa keterlibatan Tiongkok dalam proyek BRI berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap keamanan nasional Australia apabila tidak diatur dan dikendalikan secara tepat. Laporan tersebut mempertegas bahwa inisiatif BRI bukanlah proyek pembangunan yang sepenuhnya netral, melainkan memiliki dimensi geopolitik yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas pengaruh strategis Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan.

Selain pejabat negara, media seperti *The Australian* dan *ABC News* turut menyebarluaskan narasi ancaman ini melalui artikel-artikel investigatif dan opini publik. Salah satu artikel yang dimuat oleh *ABC News* pada tahun 2023 mengutip:

*“Jika pengaruh Tiongkok di Papua Nugini tidak dikendalikan, maka Australia menghadapi risiko kehilangan kendali atas kawasan Pasifik Selatan yang selama ini menjadi zona pengaruhnya”*¹⁷

Keseluruhan narasi ini menjadi elemen penting dalam proses

¹⁶ “China’s Influence in PNG Seen as Strategic Risk: Defence Official,” *The Australian*, April 2023.

¹⁷ “Beijing’s Infrastructure Diplomacy Sparks Strategic Concerns in Canberra,” *ABC News*, June 2023.

sekuritisasi, di mana pembangunan infrastruktur oleh Tiongkok yang semula bersifat ekonomi, dikonstruksikan sebagai bagian dari strategi militer dan pengaruh geopolitik. Melalui pernyataan-pernyataan ini, Australia mendapatkan legitimasi untuk mengambil tindakan luar biasa (*extraordinary measures*), termasuk penandatanganan pakta pertahanan, penguatan bantuan infrastruktur alternatif, dan peningkatan kehadiran diplomatik di kawasan Pasifik Selatan.

Strategi Respons Australia: Kebijakan Luar Biasa sebagai Langkah Sekuritisasi

Setelah membentuk narasi ancaman terhadap keterlibatan Tiongkok di Papua Nugini melalui proyek *Belt and Road Initiative* (BRI), Australia melanjutkan proses sekuritisasi dengan mengimplementasikan kebijakan luar biasa (*extraordinary measures*). Kebijakan-kebijakan ini keluar dari praktik diplomasi normal dan dimaksudkan untuk merespons ancaman eksistensial yang telah dideklarasikan melalui *speech act*. Dalam konteks ini, Australia tidak hanya mengandalkan retorika, tetapi juga mengambil langkah konkret di berbagai sektor ekonomi, pertahanan, dan diplomasi regional.

Pendirian *Australian Infrastructure Financing Facility for the Pacific* (AIFFP)

¹⁸ *Speech, "Australia's Support to Strengthen PNG's Trade and International Investment," accessed April 18, 2025,*

Sebagai bentuk tandingan terhadap pembiayaan infrastruktur oleh Tiongkok, Australia

meluncurkan *Australian Infrastructure Financing Facility for the Pacific (AIFFP)* pada tahun 2019 dengan nilai komitmen sebesar AUD 2 miliar. Melalui AIFFP, Australia menyediakan pinjaman dan hibah untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur penting di kawasan Pasifik, termasuk Papua Nugini.¹⁸

Di Papua Nugini, AIFFP telah membiayai proyek seperti pembangkit listrik tenaga air di Ramu, pengembangan pelabuhan regional di Manus Island, serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil. Pendanaan ini ditujukan untuk menciptakan ketergantungan alternatif terhadap Australia dan menekan dominasi proyek-proyek BRI yang dibiayai oleh China Exim Bank.¹⁹

Program AIFFP juga menekankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik berbeda dengan proyek BRI yang sering dikritik karena kurangnya

keterbukaan.

ayres/speech/australias-support-strengthen-ings-trade-and-international-investment?

¹⁹ Ibid.

berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai alat ideologis untuk menawarkan model pembangunan alternatif berbasis nilai-nilai liberal dan demokratis.

Penandatanganan *Bilateral Security Agreement* dengan Papua Nugini (2023) Merupakan Langkah luar biasa berikutnya adalah penandatanganan *Australia–Papua New Guinea Bilateral Security Agreement* pada Desember 2023. Perjanjian ini mencakup: Pelatihan militer dan personel polisi Papua Nugini oleh Australia, penguatan patroli laut bersama di wilayah perbatasan dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) PNG, pemberian bantuan keamanan siber, sistem komunikasi taktis, serta transfer teknologi pertahanan ringan.

Melalui perjanjian ini, Australia memperoleh legitimasi untuk memperkuat kehadiran keamanan di Papua Nugini, baik secara langsung melalui keterlibatan militer, maupun secara tidak langsung melalui pengaruh kelembagaan. Langkah ini dianggap perlu sebagai antisipasi terhadap kemungkinan kehadiran militer Tiongkok di wilayah yang sama. Dalam teori

sekuritisasi, perjanjian ini adalah bukti nyata bahwa Australia telah berhasil mengangkat isu ekonomi menjadi isu keamanan, yang kemudian dibenarkan untuk ditangani secara militer.²⁰

Penguatan Peran Australia di Forum Regional (*Pacific Islands Forum*)

Australia juga memperluas manuver diplomatiknya di forum-forum regional, khususnya *Pacific Islands Forum* (PIF). Peningkatan intensitas kehadiran Australia di forum ini bertujuan untuk mempertahankan pengaruhnya terhadap arah kebijakan kawasan dan meminimalisasi peluang Tiongkok memanfaatkan kelemahan institusional negara-negara Pasifik.

Australia memperkenalkan program *Pacific Engagement Visa*, perluasan *Pacific Australia Labour Mobility* (PALM), serta inisiatif perubahan iklim sebagai instrumen soft power untuk menarik simpati dan loyalitas negara-negara kecil di Pasifik. Pendekatan ini diintegrasikan dengan narasi “*Pacific Family*” oleh pemerintahan Anthony Albanese, yang membingkai Australia bukan sebagai kekuatan dominan, tetapi sebagai mitra dekat yang

²⁰ Wider Implications and South Pacific, “China’s Security Agreement with the Solomon Islands,” no. December (2023):

peduli dan responsif terhadap kebutuhan regional.

Namun demikian, strategi ini tetap merupakan bagian dari mekanisme sekuritisasi. Dalam forum-forum seperti PIF, Australia secara aktif mempromosikan narasi bahwa keterlibatan Tiongkok membawa risiko jangka panjang terhadap stabilitas kawasan dan ketergantungan utang. Dengan memperkuat aliansi regional, Australia membangun konsensus untuk membatasi ruang gerak Tiongkok di institusi Pasifik.²¹

KESIMPULAN

Australia memandang kehadiran proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok di Papua Nugini sebagai tantangan strategis yang dapat mengancam stabilitas kawasan dan melemahkan pengaruh tradisionalnya di Pasifik Selatan. Melalui proses sekuritisasi, Australia secara aktif mengonstruksi keterlibatan Tiongkok sebagai ancaman eksistensial, bukan sekadar kerja sama ekonomi biasa. Konstruksi ini dibangun melalui tindakan tutur (*speech act*) dari pejabat tinggi, lembaga keamanan, dan media massa yang memposisikan proyek-proyek BRI sebagai sarana penetrasi strategis Tiongkok di kawasan. Dengan demikian, Australia memperoleh

legitimasi untuk mengambil kebijakan luar biasa guna mempertahankan pengaruh geopolitiknya.

Sebagai respons terhadap konstruksi ancaman tersebut, Australia mengimplementasikan serangkaian langkah sekuritisasi, baik melalui pendekatan keras maupun lunak. Kebijakan seperti peluncuran *Australian Infrastructure Financing Facility for the Pacific* (AIFFP), penandatanganan Perjanjian Keamanan Bilateral dengan Papua Nugini, serta penguatan diplomasi di forum *Pacific Islands Forum* menjadi bukti bahwa Australia tidak sekadar menyuarakan kekhawatiran, tetapi juga bertindak aktif untuk membatasi pengaruh Tiongkok. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa sekuritisasi yang dilakukan mencakup dimensi ekonomi, pertahanan, dan regionalisme diplomatik.

Di bawah pemerintahan Anthony Albanese, sekuritisasi terhadap BRI mengalami transformasi dari gaya yang konfrontatif menjadi lebih adaptif dan inklusif. Pendekatan baru ini dikemas dalam narasi "*Pacific Family*" yang memperkuat ikatan sosial dan pembangunan kawasan sebagai strategi pengaruh jangka panjang. Meskipun gaya komunikasi berubah, substansi strategis tetap sama: mempertahankan dominasi Australia dan meminimalisasi ruang ekspansi Tiongkok. Hal ini membuktikan

²¹ Siti Nadjiha, "Persaingan China-Australia Dalam Perebutan Pengaruh Di Kawasan Pasifik," *Jurnal Asia Pacific Studies* 4, no. 1

(2020), hlm 34
<https://dx.doi.org/10.33541/japs.v4i1.1640>.

bahwa sekuritisasi tidak harus hadir dalam bentuk militeristik dan represif, tetapi juga dapat dijalankan melalui diplomasi pembangunan dan retorika solidaritas regional. Dalam konteks ini, Papua Nugini menjadi medan strategis dalam kontestasi dua kekuatan besar, dan kebijakan Australia mencerminkan dinamika baru dalam praktik sekuritisasi di kawasan Indo-Pasifik.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Bakti, Agung Jaya. "Senaspolhi 4 Fisip Unwahas 2022 | 156" (2022): 156–173. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SENASPOLHI/article/viewFile/9616/4861>.
- El-Haq Muhammad Naser, and El-Islam Muhammad Saef. "Australia Sebagai Kekuatan Regional Dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam Di Kawasan Pasifik." *Indonesian Journal of International Relations* 4, no. 1 (2020): 49–68. <https://journal.aihii.or.id/index.php/ijir/article/download/117/53>.
- Nadjiha, Siti. "Persaingan China-Australia Dalam Perebutan Pengaruh Di Kawasan Pasifik." *Jurnal Asia Pacific Studies* 4, no. 1 (2020): hlm 41. <https://dx.doi.org/10.33541/japs.v4i1.1640>.
- Nangoi, Ronald. "Australia Dan Kawasan Pasifik Selatan." *Analisis CSIS* (1983): hlm 10.
- Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner, 1998.
- Diskaya, A. "Towards a Critical Securitization Theory: The Copenhagen and Aberystwyth Schools of Security Studies." *E-International Relations* (2013).
- Mas' oed, Mochtar. *Mas' oed, Mochtar. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*. Jakarta : PT.Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta: PT.Pustaka LP3ES Indonesia, 1994.

Website

- ABC News. "Penny Wong's Pacific Diplomacy Marks a Shift in Tone." *ABC News*. August 20, 2023. <https://www.abc.net.au>.
- "Taiwan Fact Sheet." *Government of Australia*. Last modified 2024. <https://www.dfat.gov.au/geo/taiwan>.
- PALM. "The Pacific Australia Labour Mobility (PALM) Scheme Allows Eligible Australian Businesses to Hire Workers from 9 Pacific Islands and Timor-Leste When There Are Not Enough Local Workers Available." *Pacific Australia Labour Mobility*. Last modified 2024. Accessed February 10, 2025. <https://www.palmscheme.gov.au/utm>
- Speech. "Australia's Support to Strengthen PNG's Trade and International Investment." Accessed April 18, 2025. <https://ministers.dfat.gov.au/minister/tim->

[ayres/speech/australias-support-strengthen-pngs-trade-and-international-investment](#)

Wider Implications and South Pacific.

“China’s Security Agreement with the Solomon Islands,” no. DECEMBER (2023): 105–113.

Jie, Yu. “What Is China’s Belt and Road Initiative (BRI)?” *Chatham House*. Last modified 2022. <https://www.chathamhouse.org/2021/09/what-chinas-belt-and-road-initiative-bri>.